



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2019**

**DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini. Analisa ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan sasaran dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah berhasil dicapai. Dari dua Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019, menunjukkan bahwa capaian indikator angka produksi daging ruminansia lokal dikategorikan sangat tinggi dengan persentase angka produksi daging sapi lokal 100,94%, produksi daging kerbau 99,24% dan daging kambing 104,50%. Sementara capaian indikator jumlah kasus veteriner pada manusia dikategorikan tinggi dengan persentase 823,93%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. ke depan. Tantangan tersebut antara lain :

- a. Posisi Provinsi Riau yang strategis serta lalu lintas barang dan orang yang semakin ramai lancar sehingga Provinsi Riau merupakan daerah yang cukup rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik.
- b. Kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, AI, Jembrana, dll berfluktuasi tingkat kejadiannya, hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya

kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.

- c. Penyakit rabies dan AI di Provinsi Riau masih sering muncul dengan tingkat kasus yang berfluktuasi.
- d. Masih belum lancarnya penyampaian pelaporan kasus penyakit dari kabupaten/kota, sehingga kasus kejadian suatu penyakit menjadi sulit terdeteksi.
- e. Belum optimalnya pelayanan puskesmas sesuai dengan ketentuan yang ada (Permentan No. 64 tahun 2007) yang disebabkan karena keterbatasan. Tingkat pelayanan kesehatan hewan di puskesmas masih terbatas dikarenakan keterbatasan jumlah petugas puskesmas baik medis maupun paramedis, sarana obat hewan dan kendaraan operasional yang belum memadai serta luasnya wilayah yang menjadi daya jangkau kerja bagi petugas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat karunia-Nya penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat diselesaikan. LKjIP disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Semoga LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja pada masa mendatang.

Pekanbaru, Maret 2020

Plt. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU,



Ir. ELLY SURYANI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660705 199203 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi.....	3
1.3. Fungsi dan Tugas	5
1.4. Keadaan Pegawai	5
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana	8
1.6. Keuangan	9
1.7. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Organisasi.....	9
1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Perencanaan Strategis	12
2.2. Perjanjian Kinerja	15
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2019	16
2.4. Instrumen Pendukung.....	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja 2017.....	15
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Sebelumnya	17
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Renstra	18
D. Realisasi Anggaran	21
BAB IV. PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 (orang)	6
Tabel 1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 (orang) Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 (orang)	7
Tabel 1.5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 (orang)	7
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019	14
Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019	14
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019	15
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019	16
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 3.2. Kategori Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019	22
Tabel 3.3. Capaian Sasaran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 s/d 2019	23
Tabel 3.4. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra	24
Tabel 3.5. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1	27
Tabel 3.6. Kategori Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Berdasarkan Indikator Jumlah Kasus Veteriner pada Manusia Tahun 2019	29

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2015 s/d 2019	30
Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra	31
Tabel 3.9. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2	35
Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019	37
Tabel 3.11. Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019	22

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*Performance Accountability Report*) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governace* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Riau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Riau. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan juga Rencana Strategis tahun 2014-2019. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 diharapkan dapat :

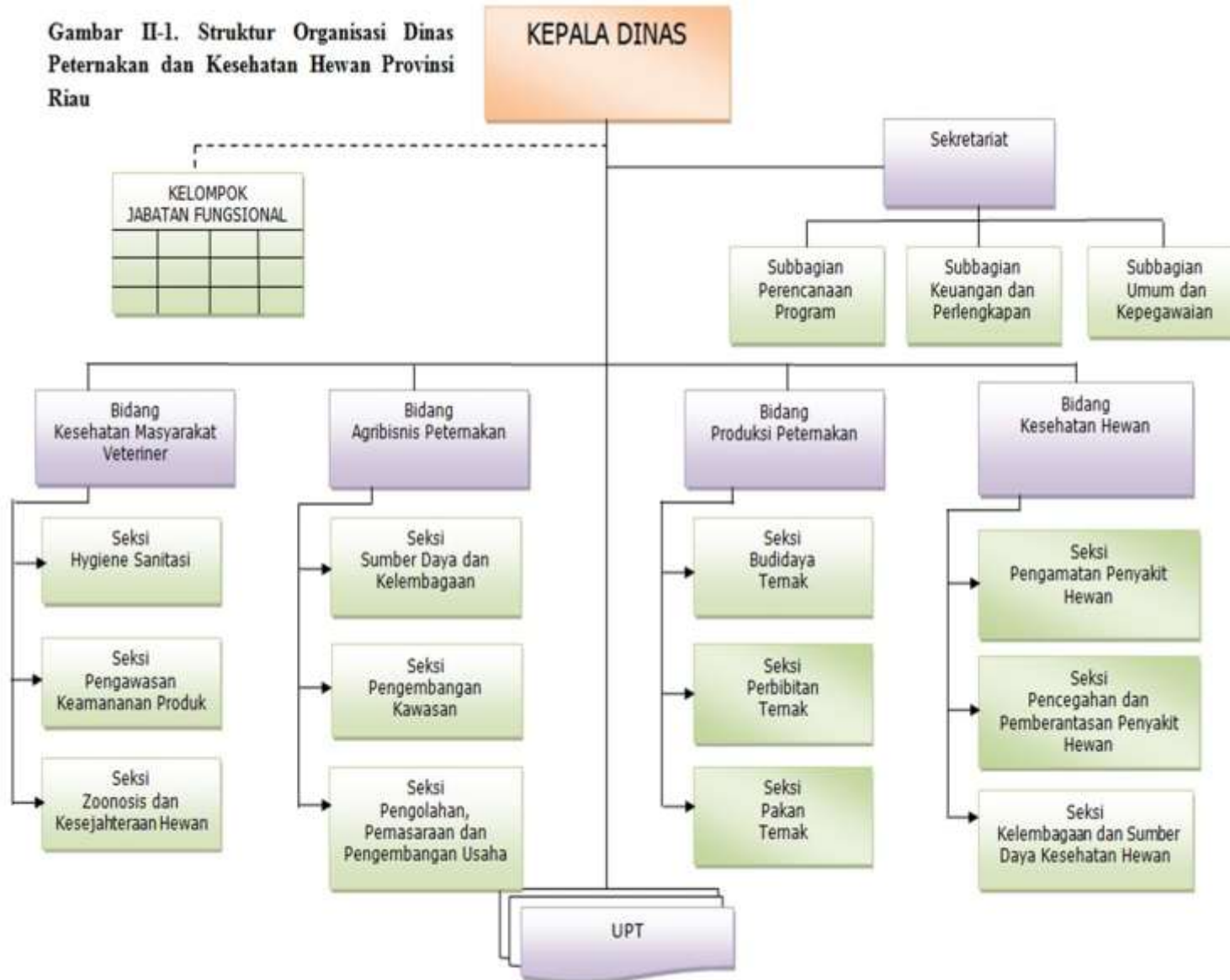
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2. Mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai struktur organisasi seperti pada Gambar 1. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Perencanaan Program; Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Produksi Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Perbibitan Ternak; Seksi Pakan Ternak; serta Seksi Budidaya Ternak.
3. Bidang Agribisnis Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Pengembangan Kawasan; Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan; serta Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha.
4. Bidang Kesehatan Hewan, yang terdiri atas : Seksi Seksi Pengamatan Penyakit Hewan; Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; serta Seksi Kalembeagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan.
5. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang terdiri atas : Seksi Hygiene Sanitasi; Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan; serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
6. UPT Rumah Sakit Hewan, yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Pelayanan Medik Veteriner.
7. UPT Inseminasi Buatan Ternak, yang terdiri atas : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
8. UPT Laboratorium Pakan Ternak, yang terdiri atas : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Pembibitan Hijauan Pakan Ternak dan Pengujian Pakan Ternak
9. Kelompok Pejabat Fungsional.

Gambar II-1. Struktur Organisasi Dinas
 Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
 Riau



1.3. Fungsi dan Tugas

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai fungsi:

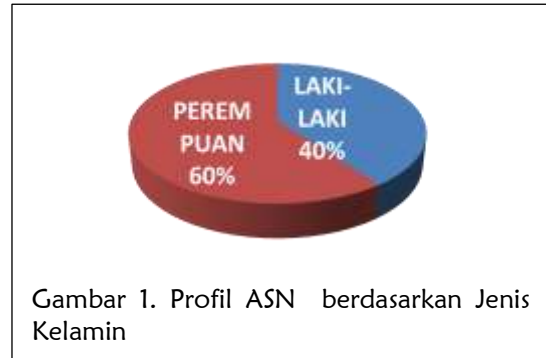
1. Penyusunan program dan pengendalian bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3. Pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran peternakan.
4. Pelaksanaan koordinasi perizinan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
6. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota.
7. Penyelenggaraan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan lintas kabupaten/kota.
8. Pemberdayaan sumber daya pertanian dan mitra kerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada tahun 2019 secara keseluruhan berjumlah 308 orang. Data kondisi pegawai disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

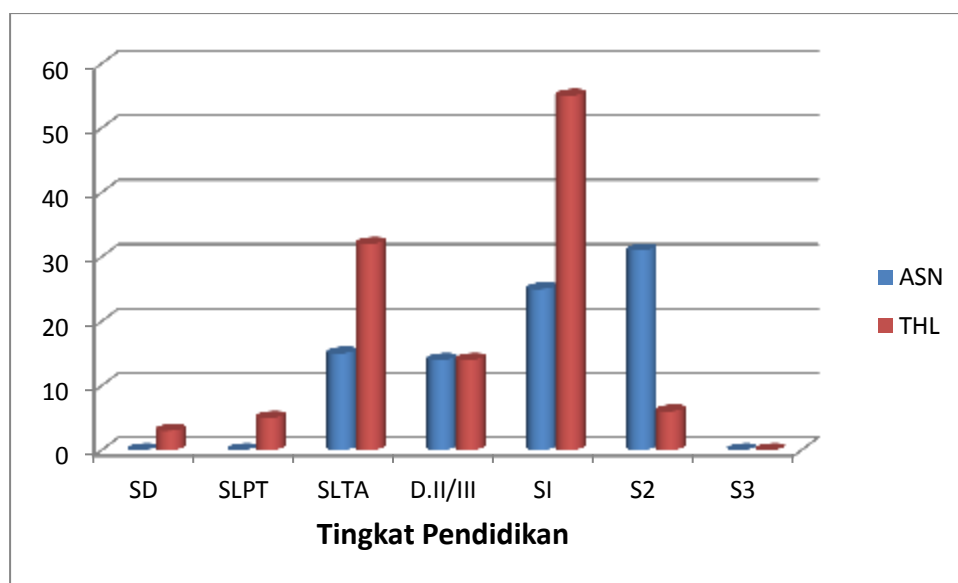
N O	UNIT	JENIS KELAMIN		JML
		LK	PR	
1	SEKRETARIAT	8	13	21
2	PRODUKSI PETERNAKAN	5	10	15
3	AGRIBISNIS PETERNAKAN	3	5	8
4	KESEHATAN HEWAN	1	3	4
5	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1	5	6
6	UPT IBD	5	5	10
7	UPT RUMAH SAKIT HEWAN	5	6	11
8	UPT LABORATORIUM PAKAN TERNAK	6	4	10
JUMLAH		34	51	85



Gambar 1. Profil ASN berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 (Orang)

No	Pendidikan	ASN	THL	Jumlah
1	S2	30	13	43
2	S1	25	97	122
3	D II/III	12	15	27
6	SLTA	17	76	93
7	SLTP	0	12	12
8	SD	0	11	11
Total		84	224	308



Gambar 2. Profil Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 (Orang)

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	23
2	Golongan III	47
3	Golongan II	14
4	Golongan I	0
Total		84

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 (Orang)

No	Bidang/UPT	ASN	THL	Jumlah
1	Sekretariat (termasuk kepala dinas dan sekretaris)	21	38	59
2	Bidang Produksi Peternakan	14	10	24
3	Bidang Agribisnis Peternakan	9	7	16
4	Bidang Kesehatan Hewan	6	7	13
5	Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	4	10
6	UPT Inseminasi Buatan Ternak	9	23	32
7	UPT Rumah Sakit Hewan	10	17	27
8	UPT Laboratorium Pakan Ternak	9	43	52
9	Honoror Pendamping Agribisnis		75	
Total		84	224	308

Tabel 1.5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 (Orang)

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Fungsional Arsiparis	0
2	Fungsional Perencana	2
3	Fungsional Medik	2
4	Fungsional Paramedik	3
5	Fungsional Pengawas Mutu Pakan	3
6	Fungsional Pengawas Bibit Ternak	3
Jumlah		13

1.5. Keadaan Sarana Dan Prasarana

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memiliki aset mulai dari tanah, gedung kantor, sarana transportasi, sarana perkantoran dan lain-lain tersebar di bidang dan UPT. Fasilitas yang tersedia pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari adalah sebagai berikut:

1. Ruang Rapat:
 - a. Ruang Rapat Besar : 1 Unit
 - b. Ruang Rapat kecil : 2 Unit
2. Tempat Upacara dan Apel Pagi dengan ukuran luas 300 m² (30m x 10m)
3. Tempat Parkir Kendaraan Bermotor:
 - a. Gedung Kantor : 1 Unit, dengan luas: 400 m²
 - b. Gedung Plaza Ternak : 2 Unit, dengan luas : 500 m²
4. Kamar Kecil/Toilet:
 - a. Gedung Dinas : 6 Unit
 - b. Gedung UPT RSH : 4 Unit
 - c. Gedung UPT IBT : 2 unit
 - d. Gedung Laboratorium UPT RSH : 1 unit
 - e. Gedung UPT Laboratorium Pakan : 2 unit
5. Halaman Kantor:
 - a. Gedung Dinas : 300 m²
 - b. Gedung UPT RSH : 400 m²
 - c. Gedung UPT IBT : 200 m²
6. Daya Listrik:
 - a. Gedung kantor : 80 A (53.000 VA)
 - b. Gedung Lab UPT RSH : 1) 100 A (66.000 VA)
2) 80 A (53.000 VA)
 - c. Gedung UPT RSH : 50 A (33.000 VA)
 - d. Gedung UPT IBT : 60 A (41.500 VA)
7. Jaringan Telepon Kabel :
 - a. Gedung Kantor : 2 Unit (no tlp: 0761 - 43441 dan 43442)
 - b. Gedung UPT RSH : 1 Unit (no tlp: 0761 – 24170)

8. Jaringan/Layanan Internet :
 - a. Gedung Kantor : 2 Unit
 - b. Gedung UPT RSH : 1 Unit
9. Kendaraan Dinas
 - a. Mobil Jabatan : 5 unit
 - b. Mobil Operasional : 11 unit
 - c. Roda 2 : 27 unit
 - d. Roda 3 : 3 unit

1.6. Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memperoleh anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Riau. Melalui APBD Provinsi Riau dialokasikan berupa belanja langsung sebesar Rp 38.348.055.636,-

Anggaran Pembangunan dari APBN yang tersedia mendukung program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, dan pada Tahun Anggaran 2019 terdapat satu Satker berupa Tugas Pembantuan. Jumlah anggaran dikelola sebesar Rp 7.565.987.000,-

1.7. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Dalam menjalankan roda organisasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis yang berupa :

1. Ketersediaan infrastruktur peternakan yang masih terbatas khususnya puskesmas dan pelayanan Inseminasi Buatan. Keterbatasan infrastuktur ini menyebabkan pelayanan menjadi belum optimal.
2. Kontribusi sektor peternakan terhadap peningkatan pendapatan peternak belum maksimal
3. Kapasitas SDM (aparatur, peternak, dan pelaku usaha) belum memadai
4. Penguasaan teknologi peternakan masih rendah
5. Daya saing, produk olahan peternakan serta pemasaran masih terbatas
6. Akses peternak terhadap permodalan masih terbatas

7. Pemanfaatan Sumber Daya lahan belum optimal. Pemanfaatan lahan sebagai penyedia pakan ternak masih sangat besar.

1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Riau, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2. 1. Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2019, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merupakan manifestasi komitmen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019).

Walaupun Renstra Dinas Peternakan tahun 2019-2024 telah disusun, namun karena penetapannya sudah mendekati waktu akhir tahun 2019, maka pada tahun 2019 segala proses perencanaan dan evaluasi tahun 2019 masih mangacu pada Renstra dan RPJMD sebelumnya yakni Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019.

RPJMD Provinsi Riau merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014– 2019.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014-2019 merupakan acuan untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis yang disusun berangkat dari permasalahan Pokok Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Riau yang dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat diringkas dalam poin-poin berikut:

1. Lambannya peningkatan produksi dan produktivitas ternak
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Kemampuan permodalan peternak terbatas
4. Penerapan teknologi peternakan masih rendah
5. Industri hilir peternakan serta pemasarannya masih terbatas
6. Lemahnya penanganan pasca panen dan pemasaran hasil peternakan.
7. Pemotongan ternak ruminansia betina produktif
8. Penyebaran penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMS)
9. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola pangan melalui 3 B (Bergizi, Beragam, Berimbang) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
10. Adanya ancaman penyakit hewan menular (Rabies dan SE)
11. Akses peternak terhadap permodalan terbatas
12. Kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur dan peternak belum memadai

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau periode 2014-2019, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran dari Misi ke 7 Kepala Daerah yakni pada misi Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan. Dalam upaya pencapaian misi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan Dinas yakni **Memperkuat Pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Sasaran Program (Outcome) sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya produksi daging ruminansia	Angka produksi daging ruminansia lokal (ton)
		Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Jumlah kasus veteriner pada manusia (orang)

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan 2 (dua) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, dalam Renstra Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal	Pengembangan kawasan peternakan berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan	Pengembangan sistem integrasi tanaman dan ternak
		Optimalisasi pemanfaatan cadangan bio-massa pakan ternak	Pengembangan pengolahan pakan ternak
		Optimalisasi produktivitas ternak	Pengembangan Inseminasi Buatan
		Optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan non-pemerintah	Pengembangan asuransi ternak
	Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Pencegahan dan pengendalian penularan penyakit menular	Peningkatan pelayanan kesehatan hewan
		Pengamanan terhadap ancaman penyakit <i>infectious emerging</i> pada manusia dan hewan	Penerapan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan berbasis <i>one health</i> .
		Restrukturisasi kelembagaan pelayanan kesehatan di wilayah potensial	Peningkatan fungsi puskesmas

2.1.3. Program

Rencana Program Kegiatan, dan indikator kinerja, sasaran kinerja serta pagu pendanaan indikatif revisi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam lima Tahun (periode 2014-2019) yang sudah direvisi disusun berdasarkan evaluasi tahun 2014-2016 serta rencana tahun 2017-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator Kinerja Program dari SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase angka kematian ternak (%)
2	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak sapi (ekor)
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan yang Mendapatkan Akses Pemasaran (kelompok)

Beberapa pengertian indikator yang perlu diperjelas adalah :

1. Angka kematian ternak adalah angka kematian ternak yang diperoleh dari analisis aplikasi ISIKHNAS (Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional)
2. Populasi Ternak Sapi adalah jumlah populasi ternak sapi akhir tahun yang telah divalidasi.
3. Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran merupakan kelompok peternakan yang memperoleh pendampingan dan peningkatan usaha sehingga dapat menjual produknya.

2.2. Perjanjian Kinerja

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala perangkat Daerah dengan Kepala Daerah (Gubernur), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis.

Untuk Tahun 2019 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana disajikan dalam Tabel 9. berikut ini:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal	Angka produksi daging ruminansia lokal (kg) - Sapi - Kerbau - Kambing	5.460.676 1.363.623 806.806
2	Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Jumlah kasus veteriner pada manusia (orang)	211

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019

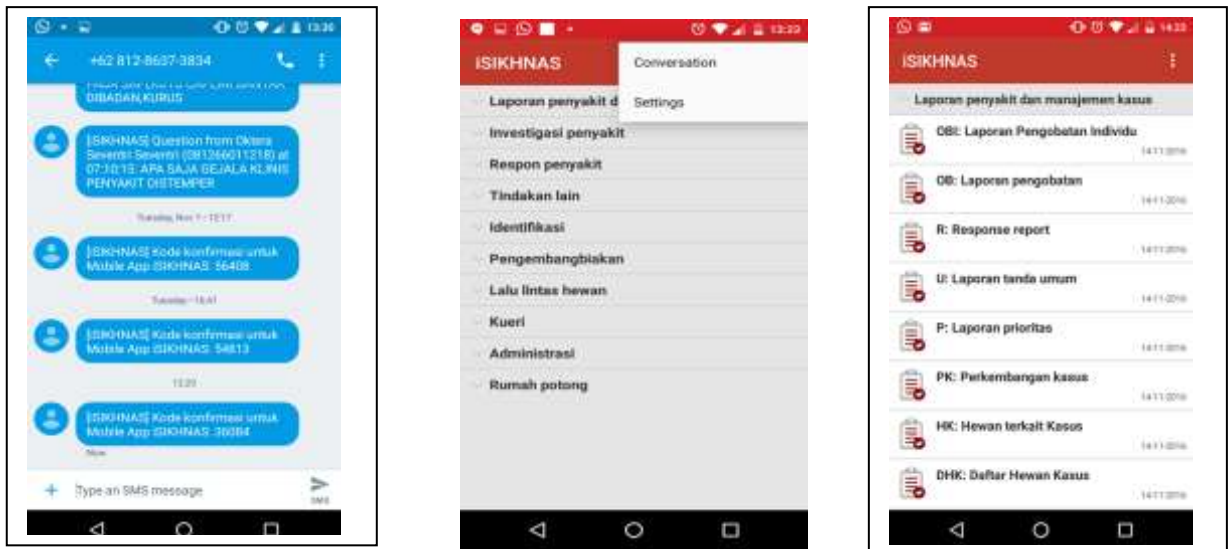
Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Riau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 54.403.843.075,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 15.165.559.360 ,- dan Belanja Langsung Rp 39.243.283.715,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp. 55.945.629.342,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 17.597.573.706,- dan Belanja Langsung Rp 38.348.055.636,-. Pelaksanaan anggaran yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan APBN tahun anggaran 2019 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar Rp. 6.665.987.000,-

yang dialokasikan untuk Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat yang mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 7.565.987.000,-.

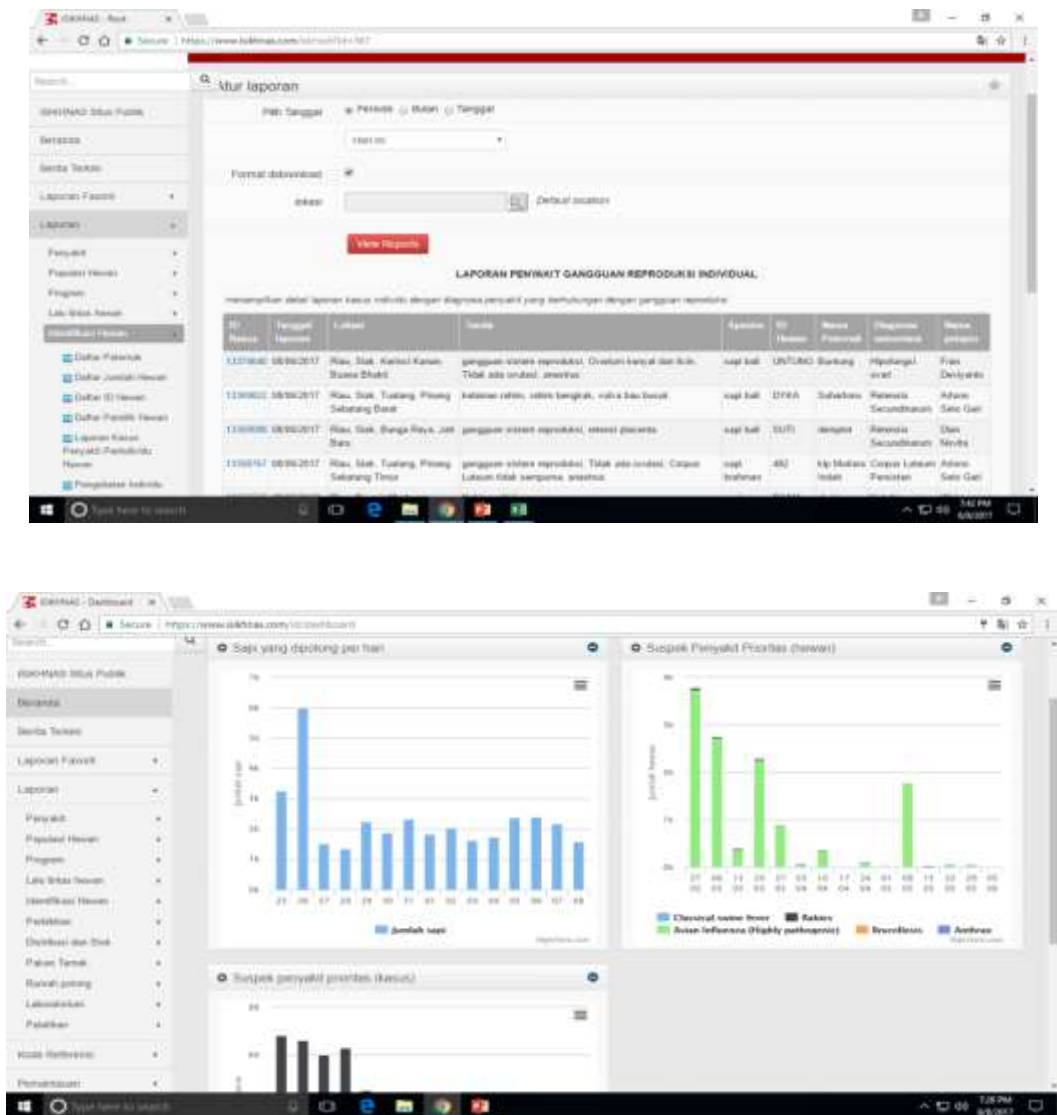
2.4. Instrumen Pendukung

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan pertemuan rutin setiap bulannya untuk mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang. Fokus utama dari pertemuan rutin setiap bulan adalah untuk mendapatkan informasi mengenai penyerapan anggaran serta realisasi fisik yang sudah terlaksana di setiap bulannya. Kegiatan Monitoring dan evaluasi juga dilakukan dengan melaksanakan peninjauan lapangan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang berkaitan dengan hibah yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Disamping itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga menggunakan sistem Informasi dalam rangka mendukung kegiatan fungsi-fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana untuk mengumpulkan data dari lapangan dan dengan segera menyediakan bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat dimanfaatkan. Sistem tersebut merupakan pengembangan sistem oleh pemerintah pusat dengan nama iSIKHNAS. Sistem ini menggunakan pesan SMS dari telepon genggam di lapangan oleh Petugas Lapangan dan lembar-lembar kerja yang lebih sederhana dari kantor, guna mengambil data dengan cepat sedekat mungkin dari sumbernya, dan membuat data dapat dilihat dan dianalisis dengan cara-cara yang mudah bagi pengguna untuk siapa pun yang memerlukannya. Sistem yang cerdas dan otomatis akan memastikan bahwa data dimasukkan secara akurat, laporan yang dikirim secara otomatis, dan terdapat akses yang mudah kepada data, analisis rutin yang terprogram, dan yang sangat penting sistem peringatan bagi staf yang perlu merespon laporan penyakit. iSIKHNAS akan memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi, guna membuat berbagai sistem tersebut lebih efisien dan terjangkau bagi lebih banyak pengguna. Dengan menggunakan iSIKHNAS, kita akan dapat menghubungkan data laboratorium dengan laporan penyakit, peta data lalu-lintas hewan dan wabah, data rumah potong dengan data produksi dan populasi, dan semua ini dilakukan secara otomatis. Hal ini sangat membantu pengambil kebijakan di berbagai tingkat, juga bagi semua orang yang bekerja dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.



Gambar 3. Tampilan aplikasi iSIKHNAS di Telepon Genggam pada Petugas Lapangan



Gambar 4. Tampilan iSIKHNAS di layar komputer

Disamping itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga memanfaatkan aplikasi pendukung untuk monitoring dan evaluasi berupa Sistem Informasi Pengendalian (<http://monev.riau.go.id>), merupakan sistem aplikasi yang disusun oleh Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau guna mendukung efektifitas dari proses monitoring dan evaluasi. Kegiatan Monitoring dan evaluasi dapat menjadi instrumen pendukung di dalam proses verifikasi dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan.

Perencanaan Program/Kegiatan APBD Tahun 2019 juga dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi perencanaan yang disusun oleh Bappeda Provinsi Riau juga sangat membantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Riau dalam melaksanakan proses perencanaan. Penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja menggunakan Aplikasi Perencanaan i-planning, sehingga kesesuaian antara sasaran, inidikator, hingga Program/Kegiatan dapat disusun dengan efektif.

Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan berbagai media informasi untuk mendukung dinamika kelembagaan, seperti brosur, leaflet, bulletin, ekspose dan media massa lainnya. Tetapi dalam perkembangannya, penggunaan berbagai media tersebut dipandang masih kurang dikarenakan semakin tidak terbatasnya ruang dan waktu untuk mewedahi perkembangan informasi tersebut. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mengelola satu buah website, yaitu : <http://dispkh.riau.go.id>

Pembuatan website ini adalah merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan E-Government pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E-Government*, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, informasi dinas, data statistik pertanian, teknologi pertanian, kebijakan pertanian serta update harga pasar.

Hadirnya website ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan masyarakat Riau khususnya masyarakat peternak dan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan peternakan. Informasi yang disediakan oleh dinas di dalam website bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberikan ide, masukan atau aduan untuk meningkatkan kualitas pembangunan peternakan di Riau.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2019 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

A. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2019

Pengukuran kinerja mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

Dengan penjelasan persentase pencapaian kinerja sebagai berikut :

- (1). Untuk indikator Angka produksi daging ruminansia lokal, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.
- (2). Pada indikator jumlah kasus veteriner pada manusia, semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, atau semakin sedikit jumlah kasus maka semakin baik capaian kinerja.

Evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 dengan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, target, realisasi dan persentase disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis I. Meningkatnya produksi daging ruminansia

Untuk menghitung capaian strategis ini, indikator yang digunakan adalah angka produksi daging ruminansia lokal. Daging ruminansia lokal yang di hitung adalah produksi daging sapi, kerbau dan kambing. Untuk menghitung angka produksi daging, adalah dengan menghitung jumlah potensi pemotongan ternak dikalikan dengan berat karkas dari jenis ternak yang dipotong.

1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2019

Untuk capaian kinerja tahun 2019 pada sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Kategori Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019*	% CAPAIAN	KATEGORI PENILAIAN
1	Meningkatnya produksi daging ruminansia	Angka produksi daging ruminansia lokal (kg)				
		Sapi	5.460.676	5.511.882	100,94%	Sangat Tinggi
		Kerbau	1.363.623	1.353.200	99,24%	Sangat Tinggi
		Kambing	806.806	843.146	104,50%	Sangat Tinggi

* Angka sementara

Dari data capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2019 untuk sasaran strategis ke-1: Meningkatnya Produksi Daging Ruminansia dengan indikator Angka Produksi Daging Ruminansia Lokal terlihat bahwa kinerjanya dikategorikan pada kategori sangat tinggi karena melebihi target yang telah ditetapkan. Target produksi daging sapi lokal pada tahun 2019 sebesar 5.460.676 kg, dengan realisasi produksi 5.511.882 kg dengan tingkat capaian 100,94%. Target produksi daging kerbau lokal pada tahun 2019 adalah sebesar 1.363.623 dengan realisasi produksi sebesar 1.353.200 kg dengan tingkat capaian 99,24%. Sedangkan untuk produksi daging kambing target 806.806 kg, realisasi 843.146 kg dengan tingkat capaian 104,50%. Angka ini masih dapat berubah karena data yang ada merupakan data sementara. Selanjutnya akan dilakukan validasi dengan petugas di daerah pada bulan Maret 2020.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Staretgis I Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi tahun 2019 tidak terlepas dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi saat ini dengan tahun sebelumnya berguna untuk melihat pertumbuhan capaian dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	% RATA-RATA PENINGKATAN /PENURUNAN
1	Meningkatnya produksi daging ruminansia	Angka produksi daging ruminansia lokal (kg)				
		Sapi	NA	5.458.589	5.511.882	0,96%
		Kerbau	NA	1.377.287	1.353.200	-1,78%
		Kambing	NA	762,453	843.146	9,57%

Dari Tabel 3.3 terlihat bahwa produksi daging sapi lokal dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan, sedangkan produksi daging kerbau mengalami penurunan 1,78%. Produksi kambing mengalami peningkatan sebesar 9,57%. Data produksi daging ruminansia lokal tahun 2017 tidak tersedia karena data yang tersedia sebelumnya berupa data produksi daging secara keseluruhan baik daging dari ruminansia lokal ataupun daging yang berasal dari luar Provinsi Riau. Dengan adanya perubahan renstra tahun 2018 dan untuk lebih dapat mengetahui sampai sejauhmana peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam meningkatkan produksi daging, maka indikator pada renstra mengalami perubahan menjadi produksi daging ruminansia lokal sehingga data produksi daging ruminansia lokal baru tersedia sejak tahun 2018.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2019 dengan Target Renstra

Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian target renstra, maka dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2019 dengan target akhir renstra yang mana target akhir renstra sama dengan target tahun 2019 karena renstra yang digunakan berakhir pada tahun 2019. Capaian akhir renstra untuk indikator produksi daging ruminansia lokal dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran Startegis I Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN HINGGA 2019	TARGET CAPAIAN AKHIR RENSTRA (2019)	CAPAIAN 2019 TERHADAP TARGET CAPAIAN AKHIR RENSTRA	KATEGORI PENILAIAN
1	Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal	Angka produksi daging ruminansia lokal (kg)				
		Sapi	5.511.882	5.460.676	100,94%	Sangat Tinggi
		Kerbau	1.353.200	1.363.623	99,24%	Sangat Tinggi
		Kambing	843.146	806.806	104,50%	Sangat Tinggi

Dari Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa capaian terhadap renstra dalam kategori sangat tinggi dan bahkan sudah melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan target renstra, kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam meningkatkan produksi daging ruminansia sudah sangat bagus. Namun walaupun sudah mencapai target, usaha untuk meningkatkan produksi daging ruminansia lokal ini harus tetap dilanjutkan dan ditingkatkan karena produksi daging ruminansia lokal saat ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daging di Riau. Pemenuhan kebutuhan daging di Riau masih ditambah dari daging yang didatangkan dari daerah lain.

4. Analisis Peningkatan/Penurunan Produksi Daging Ruminansia Lokal dan Alternatif Solusi

Berdasarkan target renstra, produksi daging ruminansia lokal di Provinsi Riau sudah mencapai target yang ditetapkan, namun kalau dibandingkan dengan kebutuhan daging di Provinsi Riau maka produksi daging saat ini belum mencukupi. Upaya untuk meningkatkan produksi daging lokal di Provinsi Riau sudah dilakukan namun belum memberikan hasil yang maksimal. Lambannya peningkatan produksi daging ruminansia terutama daging sapi dan kerbau antara lain disebabkan oleh :

- Gencarnya pemasukan daging beku dari luar provinsi ataupun dari luar negeri yang harganya jauh lebih murah dibanding daging sapi lokal

menyebabkan melemahnya keinginan peternak lokal maupun RPH menjual dan memotong ternaknya sehingga berpengaruh juga pada jumlah produksi daging lokal.

- Pelaku usaha peternakan sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif sehingga produktivitas tidak optimal.
- Terbatasnya ketersediaan pakan ternak berkualitas. Budidaya bahan baku pakan dan pengolahan pakan masih terbatas hanya skala rumah tangga oleh masyarakat peternak lokal. Tingginya harga bahan baku tambahan pakan seperti obat, vitamin dan mineral yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh peternak. Peternak lokal dengan keterbatasan biaya pengadaan pakan hanya mengambil langkah alternatif lain yaitu dengan tetap mempertahankan cara pengolahan pakan secara tradisional dan konvensional tanpa didukung pengetahuan dan teknologi terkini dan modern.
- Adanya ancaman penyakit menular yang berpotensi menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis). Penyakit hewan sudah menjadi bagian keseharian yang sangat penting yang menentukan keberhasilan peningkatan produksi ternak itu sendiri. Secara cermat penyakit ternak sangat bervariasi dari satu jenis ternak dengan jenis ternak lainnya dan dapat ditularkan dari satu ternak ke ternak lainnya atau jenis lainnya. Penyakit pada ternak sendiri, tidak dapat diprediksi secara tepat kapan, dimana dan oleh apa pemicunya. Hal ini sangat dinamis dan banyak dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal ternak atau hewan itu sendiri. Faktor internal munculnya penyakit adalah kurangnya daya tahan tubuh ternak yang sebagian besar dipicu oleh kurangnya asupan pakan yang bergizi, kebersihan tubuh ternak yang kurang memadai, penularan penyakit oleh ternak lainnya. Faktor eksternal yang sering mempengaruhi adalah kondisi geografis dan iklim di Indonesia yang sangat variatif. Provinsi Riau dengan tingkat perubahan cuaca dan kelembabannya yang tinggi banyak mempengaruhi kondisi ternak dimana seperti pada musim hujan, maka potensi terjadinya

serangan wabah penyakit sangat besar. Penyebaran penyakit menjadi sangat cepat karena didukung oleh kondisi alam seperti banjir, angin dan cuaca lainnya.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menunjang peningkatan produksi daging ruminansia lokal serta mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan:

- Memprioritaskan pengembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang diarahkan pada perbaikan mutu bibit ternak, pengembangan pakan ternak yang murah dan berkualitas, peningkatan pelayanan kesehatan hewan serta melakukan pengawasan dan pengujian kualitas produk asal hewan.
- Memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor, dan penguasaan teknologi Inseminasi Buatan serta melengkapi sarana dan prasarana inseminasi buatan.
- Memberikan bantuan pakan ternak, dan atau fasilitasi pelatihan bagaimana menyediakan pakan ternak berkualitas dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.
- Mengembangkan sistem integrasi ternak tanaman terutama ternak sapi dan sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani berupa upaya peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan lokal dan pemanfaatan limbah ternak dalam bentuk padat dan cair (*biofertilizer*) dengan mengembangkan pada kawasan peternakan yang sudah ditetapkan dalam masterplan pembangunan peternakan Provinsi Riau.
- Pengembangan SDM dan kelembagaan agribisnis peternakan
- Peningkatan kualitas petugas yang berkelanjutan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, seminar atau bimbingan teknis baik yang dilakukan oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Produksi Daging Ruminansia Lokal sesuai Perjanjian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk mencapai target peningkatan produksi daging ruminansia lokal pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis ke-1

No	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja 2019	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2019
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					
1	Pembibitan Dan Perawatan Ternak	Jumlah bibit ternak yang dipelihara (ekor)	230	230	100,00
2	Pengembangan Agribisnis Pertenakan	Jumlah ternak sapi model integrasi (ekor)	95	95	100,00
3	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Frekuensi monev (kali)	24	24	100,00
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	Jumlah Sarana dan Prasarana UPT Laboratorium Pakan Ternak (Paket)	3	3	100,00
5	Pengembangan Produksi Semen Beku	Jumlah straw yang diproduksi (dosis)	40.000	46.009	115,02
6	Pendamping Teknis Ternak yang Didistribusikan Pada Masyarakat	Jumlah pendamping teknis peternakan (orang)	750	750	100,00
7	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah kebuntingan ternak hasil IB (ekor)	4.896	8.679	177,27
8	Pengembangan budidaya ternak ruminansia	Jumlah kelompok ternak ruminansia yang menerapkan GFP (kelompok)	25	49	196,00
9	Pemutakhiran Data Teknis Peternakan dan Keswan	Jumlah Dokumen (buku)	2	2	100,00
10	Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak	Jumlah bibit BPT yang dihasilkan (batang)	1.020	722	70,78

11	Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan SPR yang dibina (SPR)	3	3	100,00
12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan	Jumlah sarana dan prasarana IB yang disediakan (unit)	9.000	9.000	100,00
13	Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan Iseminasi Buatan	Jumlah sarana dan prasarana UPT IB yang disediakan (unit)	20	20	100,00
14	Penguatan Pembibitan Ternak	Jumlah kelompok yang melaksanakan GBP (kelompok)	6	6	100,00
15	Pendistribusian Ternak Sapi kepada Masyarakat	Jumlah Ternak Sapi yang didistribusikan (Ekor)	165	165	100,00
16	Verifikasi Lokasi dan Kelompok Peternakan	Jumlah Kelompok yang diverifikasi (kelompok)	150	172	114,67
17	Monitoring dan Evaluasi Straw UPT. IBT	Frekuensi Monev Straw (Kali)	2	2	100,00
18	Pembangunan/Perbaikan UPT. Inseminasi Buatan Ternak Dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana UPT. IBT	13	13	100,00

Dari Tabel 14 terlihat bahwa untuk meningkatkan produksi daging ruminansia lokal maka program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Outcome yang diharapkan dari Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan adalah peningkatan jumlah populasi ternak yang secara langsung akan meningkatkan produksi daging. Penambahan populasi ternak dapat dilakukan melalui penambahan kelahiran baik yang berasal dari Kawin Alam ataupun yang berasal dari Inseminasi Buatan. Capaian sasaran strategis angka produksi daging ruminansia lokal terutama sapi yang mencapai 100,94% melebihi dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil meningkatkan produksi daging terutama daging sapi dan kambing. Dari kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan hampir seluruh kegiatan capaian kinerjanya mencapai 100% malah terdapat 4 kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi 100%, hanya satu kegiatan yang

capaian kinerjanya dibawah 100% yakni pada Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Pakan ternak yang capaian kinerjanya hanya mencapai 70,78%. Pada Kegiatan Pengembangan Inseminasi Buatan capaian kinerja mencapai 177,27%. Kegiatan ini memberi pengaruh yang besar pada penambahan populasi ternak karena dengan adanya Inseminasi Buatan membantu peternak yang memiliki sapi betina produktif menjadi bunting walaupun tidak memiliki sapi jantan.

Sasaran Strategis II. Meningkatnya Keamanan Masyarakat dari Ancaman Penyakit Hewan

Untuk menghitung capaian kinerja sasaran strategis ke 2 adalah dengan indikator jumlah kasus veteriner pada manusia. Pada indikator jumlah kasus veteriner pada manusia, penilaiannya semakin tinggi/banyak kasus veteriner pada manusia menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, atau semakin sedikit jumlah kasus maka semakin baik capaian kinerja.

1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2019

Capaian sasaran meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan yang diukur dengan jumlah kasus veteriner pada manusia dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6. Kategori Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Berdasarkan Indikator Jumlah Kasus Veteriner pada manusia Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019*	% CAPAIAN	KATEGORI PENILAIAN
1	Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Jumlah kasus veteriner pada manusia (orang)	211	247	82,93%	Tinggi

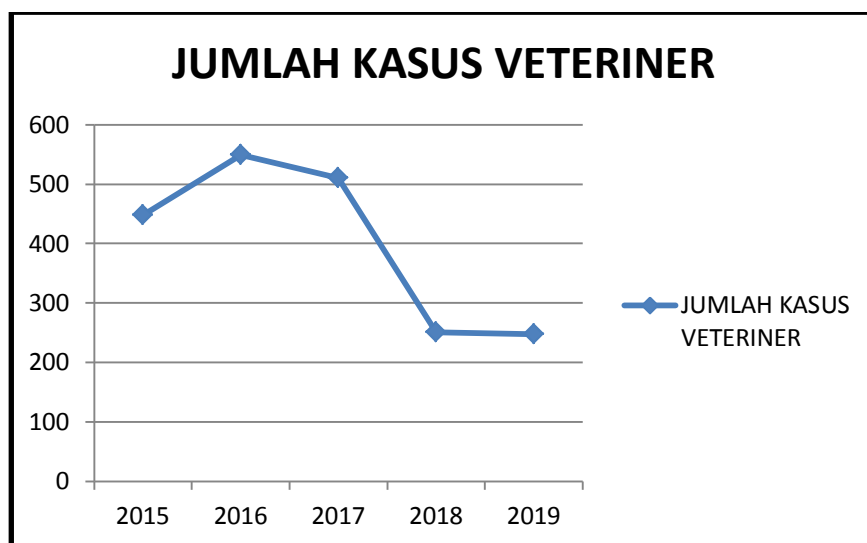
Pada Sasaran Strategis ke-2 yakni meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan dengan indikator jumlah kasus veteriner pada manusia target yang ditetapkan belum dapat tercapai. Kasus yang terjadi melebihi dari target yang telah ditetapkan dimana ditargetkan kasus yang terjadi dibawah 211 kasus, sedangkan selama tahun 2019 kasus veteriner pada manusia mencapai 247 kasus. sehingga capaiannya hanya mencapai 82,93%. Namun capaian ini sudah dikategorikan baik atau kinerjanya sudah dinilai tinggi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Staretgis II Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi tahun 2019 tidak terlepas dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi saat ini dengan tahun sebelumnya berguna untuk melihat pertumbuhan capaian dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					% RATA-RATA PENURUNAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Jumlah kasus veteriner pada manusia (orang)	448	549	510	251	247	-13,83%



Gambar 3.1. Grafik Kasus Veteriner pada manusia Tahun 2015-2019

Pada sasaran strategis yang ke dua yakni Meningkatnya Keamanan Masyarakat Dari Ancaman Penyakit Hewan dapat dilihat bahwa jumlah kasus veteriner pada manusia dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kecendrungan menurun. Kinerja terbaik dengan penurunan jumlah kasus veteriner pada manusia terjadi pada tahun 2018 dengan penurunan drastis. Rata-rata jumlah kasus veteriner pada manusia mengalami penurunan 13,83% setiap tahunnya. Hal ini dapat dianggap sebagai suatu keberhasilan dari kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam hal menurunkan jumlah kasus veteriner yang terjadi pada manusia.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2019 dengan Target Renstra

Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian target renstra, maka dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2019 dengan target akhir renstra yang mana target akhir renstra sama dengan target tahun 2019 karena renstra yang digunakan berakhir pada tahun 2019. Capaian akhir renstra untuk indikator jumlah kasus veteriner pada manusia dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel.3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN HINGGA 2019	TARGET CAPAIAN AKHIR RENSTRA (2019)	CAPAIAN 2019 TERHADAP TARGET CAPAIAN AKHIR RENSTRA	KATEGORI PENILAIAN
1	Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Jumlah kasus veteriner pada manusia (orang)	247	211	82.93%	Tinggi

Dari Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis ke-2 terhadap renstra belum mencapai target hanya sampai 82,93%, namun capaian hingga 82,93% sudah dalam kategori tinggi dalam arti upaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam meningkatkan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan sudah bagus.

4. Analisis Peningkatan/Penurunan Jumlah Kasus Veteriner pada Manusia dan Alternatif Solusi

Dalam meningkatkan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan dengan mengurangi kasus veteriner pada manusia selama lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Namun capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target adalah :

- a. Posisi Provinsi Riau yang strategis serta lalu lintas barang dan orang yang semakin ramai lancar sehingga Provinsi Riau merupakan daerah yang cukup rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik.
- b. Kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, AI, Jembrana, dll berfluktuasi tingkat kejadiannya, hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.
- c. Penyakit rabies dan AI di Provinsi Riau masih sering muncul dengan tingkat kasus yang berfluktuasi.
- d. Masih belum lancarnya penyampaian pelaporan kasus penyakit dari kabupaten/kota, sehingga kasus kejadian suatu penyakit menjadi sulit terdeteksi.
- e. Belum optimalnya pelayanan puskesmas sesuai dengan ketentuan yang ada (Permentan No. 64 tahun 2007) yang disebabkan karena keterbatasan. Tingkat pelayanan kesehatan hewan di puskesmas masih terbatas dikarenakan keterbatasan jumlah petugas puskesmas baik medis maupun paramedis, sarana obat hewan dan kendaraan operasional yang belum memadai serta luasnya wilayah yang menjadi daya jangkau kerja bagi petugas.
- f. Semakin meningkatnya arus lalu lintas ternak yang ramai lancar dan sulit dipantau ke Provinsi Riau baik antar provinsi dan kabupaten/kota sehingga Provinsi Riau rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular dari daerah lainnya, hal ini terkait dengan minimnya petugas baik secara kualitas maupun kuantitas serta masih terbatasnya area cek

point pada masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan pada kabupaten/kota yang telah memiliki area cek point, tidak dapat difungsikan secara optimal.

- g. Masih kurangnya jumlah petugas puskesmas di kabupaten/kota, sehingga diperlukan adanya penambahan penempatan Tenaga Harian Lepas (THL) baik medis maupun paramedis dari pusat di kabupaten/kota masih kurang.
- h. Mengingat terjadinya penularan rabies pada daerah yang bebas, hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan pada pintu masuk (cek point) juga karena banyaknya peluang kemungkinan masuknya ternak atau hewan melalui pelabuhan yang tidak resmi.

Alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan petugas PPV di lapangan melalui SMS Gateway dan iSIKHNAS, sehingga informasi penyakit dapat diketahui dengan cepat, seperti Rabies, AI dan SE yang berkaitan dengan kondisi kurang mendukung seperti banjir dan serta cuaca ekstrem dengan penyampaian pelaporan penyakit dikirimkan dengan tepat waktu atau realtime.
- b. Dalam upaya memenuhi jumlah dan kualitas petugas, diupayakan merekrut tenaga harian lepas baik dari pusat dan daerah serta melatih petugas yang ada dalam bidang teknis keswan
- c. Agar informasi tentang penyakit dapat diketahui, maka diupayakan pengoptimalan petugas PPV dilapangan yang menginformasikan selain penyakit prioritas seperti AI, Rabies, Jembrana, SE serta sehingga informasi dapat diketahui dengan cepat.
- d. Keterbatasan SDM diupayakan melalui penerimaan tenaga medis dan non medis yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota kabupaten/kota serta dropping THL dari pusat.
- e. Dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM dilapangan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan, magang, pertemuan teknis dibidang kesehatan hewan.

- f. Dalam penyediaan sarana prasarana dibidang keswan, maka diharapkan kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten/Kota, disamping sharing melalui anggaran APBD Provinsi dan APBN pusat, untuk itu perlu koordinasi dan informasi yang baik sehingga kegiatan pelayanan keswan dapat berjalan dengan baik.
- g. Dalam upaya mempertahankan atau mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular (PHM) baik dari antar provinsi, antar pulau, dan antar kabupaten/kota, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pemasukan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis serta melakukan pengujian kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap ternak tersebut.
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan, karantina, Polri dalam hal pengawasan lalu lintas ternak dan upaya penanggulangan penyakit di area cek point perbatasan.
- i. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan hewan melalui puskesmas, maka diupayakan peningkatan sarana puskesmas, SDM (medis, paramedis, Vaksinator, ATR), obat-obatan, kendaraan operasional yang diupayakan melalui anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN Pusat.
- j. Merintis pembebasan bagi daerah-daerah yang berpotensi untuk dibebaskan penyakit secara bertahap serta melakukan kajian analisa resiko terhadap daerah yang dibebaskan.

5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Produksi Daging Ruminansia Lokal sesuai Perjanjian Kinerja

Peningkatan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan dengan indikator jumlah kasus veteriner pada manusia diwujudkan dengan melaksanakan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang sudah

dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk mencapai target penurunan kasus veteriner pada manusia pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis ke-2

No	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja 2019	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2019
	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka kematian ternak	5%	2,2%	156%
1	Pendataan Masalah Peternakan	Terlaksananya buku statistik peternakan dan data base peternakan	3	3	100,00
2	Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah penanganan kesehatan ternak (ekor)	7.500	47.955	639,40
3	Pengadaan Obat Hewan	Jumlah obat hewan dan vaksin (dosis)	79.000	79.000	100,00
4	Penanggulangan Rabies dan SE	Jumlah penanganan kasus dan SE (kasus)	32	35	109,38
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas	Jumlah tenaga medis (orang)	70	70	100,00
6	Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengamatan Produksi Hasil Hewan	Jumlah spesimen hewan dan sampel produk asal hewan (sampel)	18.000	89.795	498,86
7	Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan	Jumlah penanganan kasus gangguan reproduksi (kasus)	2.000	3.003	150,15
8	Pengawasan Peredaran Produk Pangan Asal Hewan dan Non Pangan Asal Hewan	Jumlah unit usaha yang diawasi penerapan penjaminan produk hewan yang ASUH (unit usaha)	26	32	123,08
9	Pengawasan Penerapan Kesejahteraan Hewan dan Zoonosis	jumlah unit usaha yang diawasi dari aspek kesrawan dan zoonosis (unit usaha)	70	70	100,00
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. RSH	Jumlah Sarana dan Prasarana UPT RSH yang diadakan (Paket)	14	14	100,00
11	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan UPT. RSH	Jumlah Hewan yang Diobati dan Divaksinasi (Ekor)	1.500	4.479	298,60
12	Pembangunan/Perbaikan UPT. Rumah Sakit Hewan Dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Sarana dan Prasarana UPT RSH yang diadakan (Paket)	10	10	100

Dari Tabel 3.9 dapat dilihat bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan, pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit berjalan dengan baik dan lancar. Target angka kematian ternak tahun 2019 sebesar 5% dapat ditekan kematian ternaknya menjadi 2,2% sehingga realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan adalah sebesar 156%. Pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan, seluruh kegiatannya telah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan pada beberapa kegiatan realisasinya jauh melebihi target. Kegiatan-kegiatan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan antara lain adalah Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dengan capaian kinerja hingga 639,4%, Kegiatan Pengadaan obat Hewan dengan capaian kinerja 100%, Kegiatan Penanggulangan Rabies dan SE dengan capaian kinerja 109,38%, Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas dengan capaian kinerja 100%, Kegiatan pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan dengan capaian melebihi target sebesar 298%, Kegiatan Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dengan capaian kinerja melebihi target sebesar 498,86%, Kegiatan Penanggulangan Gangguan Penyakit Reproduksi Asal Hewan dengan capaian 150,15% dan kegiatan-kegiatan lainnya yang capaiannya juga melebihi target. Dengan capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan maka tahun 2019 Jumlah kasus veteriner dapat dikurangi menjadi 247 kasus yang sebelumnya tahun 2018 kasus veteriner pada manusia sebanyak 251 kasus.

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 didasarkan pada realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada tahun 2019 memperoleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 38.348.055.636,- Dari total anggaran tersebut yang terealisasi

sebesar Rp.31.168.512.629,- atau sebesar 81,28 %. dengan rincian per program seperti tercantum dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019

PROGRAM		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
A	UTAMA	32.813.590.636	27.174.506.793	82,86%
1	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	18.513.705.598	15.504.831.050	83,75
2	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	13.478.974.917	11.392.031.222	84,52
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak	820.910.121	277.644.521	33,82
B	PENUNJANG	5.534.465.000	3.994.005.836	72,17%
	TOTAL (A+B)	38.348.055.636	45.805.793.959	81,28%

Dari anggaran yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat bahwa program yang paling besar anggarannya adalah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan sebesar Rp 18.513.705.598,- dengan serapan anggaran 83,75%. Untuk serapan anggaran terbesar adalah Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan anggaran Rp 13.478.974.917,- dan serapan 84,52%. Sementara serapan anggaran paling kecil pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak dengan serapan hanya 33,82%.

Disamping dana dari APBD Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga memperoleh dana untuk pembangunan peternakan dan kesehatan yang berasal dari dan APBN dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Output	Pagu (Rp. 000)	Target			Realisasi		
				Fisik (%)	Keu (Rp. 000)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (Rp. 000)	Keu (%)
I	Pemenuhan Pangan Asal Ternak Dan Agribisnis Peternakan Rakyat								
1.	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	27.000 Akseptor	3.273.005	100	3.273.005	100	100	3.255.272	99,46%
		1.200 Ekor	200.000	100	200.000	100	100	197.571	98,79%
2.	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	15 Ha	312.550	100	312.550	100	100	311.445	99,65%
		108 Ton	900.000	100	900.000	100	100	882.793	98,09% ¹
			50.000	100	50.000	100	100	48.755	97,51%
3.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	40.000 Dosis	1.310.000	100	1.310.000	100	100	1.254.207	95,74%
4.	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)		477.000	100	477.000	100	100	426.751	89,47%
5.	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	1 Unit	200.000	100	200.000	100	100	180.097	90,05%
			205.200	100	205.200	100	100	192.646	93,88%
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan		668.232	100	668.232	100	100	635.120	95,04%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran strategis, dengan dua indikator kinerja utama diketahui bahwa pada sasaran strategis Meningkatnya produksi daging ruminansia dengan indikator angka produksi daging ruminansia lokal menunjukkan hasil kinerja yang sangat tinggi dengan persentase capaian kinerja produksi daging sapi lokal 100,94%, capaian kinerja untuk indikator angka produksi daging kerbau lokal 99,24% dan capaian kinerja produksi daging kambing 104,5%. Sedangkan pada sasaran strategis meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan dengan indikator kinerja utama jumlah kasus veteriner pada manusia menunjukkan capaian kinerja yang belum mencapai target namun capaiannya sudah tergolong tinggi dengan capaian kinerja 82,93%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala.
2. Permasalahan dalam pengendalian penyakit ternak/hewan salah satunya adalah karena kurang terpantaunya lalul lintas ternak dari daerah/provinsi lain sehingga resiko masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik dari

daerah/provinsi lain semakin besar dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.

Upaya/saran tindak lanjut yang dilakukan diantaranya adalah :

1. Dalam upaya mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular (PHM) baik dari antar provinsi, antar pulau, dan antar kabupaten/kota, maka perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat terhadap pemasukan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis serta melakukan pengujian kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap ternak tersebut.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan, karantina, Polri dalam hal pengawasan lalu lintas ternak dan upaya penanggulangan penyakit di area cek point perbatasan.
3. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan hewan melalui puskesmas, maka perlu peningkatan sarana puskesmas, SDM (medis, paramedis, Vaksinator, ATR), obat-obatan, kendaraan operasional yang diupayakan melalui anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN Pusat.

Hasil evaluasi telah menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam membangun usaha tani ternak cukup besar dan hal ini telah didukung oleh tersedianya peluang potensi pembangunan peternakan yang cukup baik, serta potensi pemasaran yang strategis. Oleh karena itu diharapkan ke depan para pengambil keputusan hendaknya dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih baik lagi dalam pengalokasian sumber dana pembangunan Peternakan di Provinsi Riau.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. HERMAN, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAMSUAR
Jabatan : Gubernur Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja disebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pekanbaru, Maret 2019
Pihak Pertama,

Ir. H. HERMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630512 199303 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya produksi daging ruminansia	Angka produksi daging ruminansia lokal (kg)	
		a. Sapi	5.460.676
		b. Kerbau	1.363.623
		c. Kambing	806.806
2.	Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Jumlah kasus veteriner pada manusia (orang)	211

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	13.838.286.417	APBD
2. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	18.893.320.598	APBD
3. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI	848.661.700	APBD
4. PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNA DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN	6.665.987.000	APBN

Pekanbaru, Maret 2019

Plt. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Ir. H. HERMAN, M.Si